

BAB III

PROASES MASUKNYA SIPRUS DALAM KEANGGOTAAN UNI EROPA

3.1 Tinjauan Umum Siprus

3.1.1 Sejarah Singkat Siprus

Siprus memiliki posisi yang sangat strategis di kawasan Mediterania, sehingga sejak awal telah menjadi pusat perdagangan dan menjadi wilayah yang diperebutkan oleh berbagai negara. Menurut sejarah Siprus telah dihuni sejak jaman Neolitikum (8500 SM) . Setelah itu Siprus telah diduduki oleh berbagai bangsa antara lain, yaitu : Mycenia, Punicia, Mesir, Assiria serta Persia. Pada 295 SM, kaisar Ptolemius I (mantan jendral Iskandar Agung) berhasil menguasai Mesir berarti juga menguasai Siprus yang saat itu merupakan jajahan Mesir. Dinastinya memerintah Siprus sampai ditaklukan oleh Kekaisaran Romawi pada 58 SM.⁷³

Sebagai bagian kekaisaran Romawi, Siprus cukup mengalami kemajuan dan kejayaan. namun setelah itu Siprus mengalami kemunduran setelah Romawi ditaklukan oleh kekaisaran bizantium dan dilanjutkan oleh kekaisaran Islam, sejak abad ke 7 sampai dengan abad 11 Siprus telah mengalami 11 kali pergantian kekuasaan dari berbagai negara. Pada tahun 1191 raja Richard dari Inggris berhasil merebut Siprus. Namun ketika rakyat Siprus memberontak, Inggris menyerahkan Siprus kepada tentara Salib. Namun tentara Salib juga menyerahkan Siprus kepada Guy de Lusignan (Founder & Lord of Cyprus 1192-1194) yang pada akhirnya memerintah Siprus sampai 300 tahun. Pada masa ini merupakan jaman kemakmuran, namun sekaligus masa kemerosotan bagi kebudayaan Siprus dan agama Kristen Ortodoks Yunani. Pada akhir abad ke 14, dinasti Lusigna mulai melemah sampai akhirnya ditaklukan oleh bangsa Venesia pada tahun 1489. Namun tahun 1571 kekaisaran Ottoman Turki berhasil menaklukan Venesia dan akhirnya memerintah Siprus sampai 1878.

Pada 1878 administrasi Siprus diberikan kepada Inggris dengan janji bahwa Inggris akan membantu Turki jika Rusia menyerang Turki. Hal ini

⁷³ [www. Cia. Gov./factbook/html](http://www.Cia.Gov./factbook/html)

dilakukan akibat dari ketakutan Turki karena politik invasi Rusia pada saat itu. 1925 Siprus akhirnya resmi menjadi koloni Inggris. Sejak saat itu, semangat warga Siprus untuk berdaulat atas wilayahnya sendiri mulai meningkat. Pada saat itu muncul gerakan *enosis* (bergabung dengan Yunani).

Hal ini menyebabkan awal bentrokan antara warga Siprus Yunani dengan warga Siprus Turki. Namun semangat *enosis* turun karena dikhawatirkan hal tersebut akan menjadikan penjajahan berikutnya. Namun akhir tahun 1940-an Gereja Siprus Ortodoks secara terang-terangan mendukung *enosis* dan pada 1951 menunjukkan bahwa 96% masyarakat Siprus Yunani mendukung *enosis*.

Pada tahun 1954 Inggris menyiapkan konstitusi Siprus yang diterima oleh komunitas siprus Turki namun ditolak oleh masyarakat Siprus Yunani dibawah Organisasi Perlawanan Siprus Merdeka (EOKA) yang lebih *enosis* dan menghendaki melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan pemerintah Inggris untuk memperoleh kemerdekaan.

Pada tahun 1960 akhirnya Inggris memberikan kemerdekaan kepada Siprus dimana Uskup Makarios diangkat menjadi Presiden dan Faisal Kukul sebagai wapres. Uskup Makarios mengajukan amandemen konstitusi pada intinya memberikan kekuasaan lebih besar kepada warga Siprus Yunani. Hal ini menyebabkan Turki berang dan mengancam untuk menyerang Siprus, namun hal ini urung dilakukan karena tekanan masyarakat internasional. Hal ini menyebabkan bentrokan berdarah antar-komunal semakin meningkat yang menyebabkan PBB mengirimkan pasukan perdamaian (UNFICYP) pada tahun 1964.

Pada tahun 1967 Junta militer menguasai Yunani yang menyebabkan gerakan *enosis* Siprus berhenti, karena rakyat Siprus tidak mau diperintah oleh Junta Militer yang diktator. Junta Militer anti kepada pemerintahan Makarios.

15 Juli 1974 Yunani berhasil menjatuhkan pemerintahan Makarios melalui kudeta. Sebagai gantinya Yunani menunjuk Nicos Samson sebagai Presiden Siprus. Tindakan Yunani ditanggapi Turki dengan melakukan invasi pada 14 Agustus 1974 dan mengakibatkan dicopotnya Nicos dan di gantikan oleh ketua parlemen Siprus Glafcosd Clarides, namun hal ini belum membuat Turki puas dan mereka melakukan invasi sampai 1/3 wilayah Siprus Utara dan mengusir 180.000

warga Siprus Yunani ke wilayah Selatan. Ribuan warga Siprus Yunani mendapatkan perlakuan buruk di kamp-kamp penangkapan dan terbunuh secara keji oleh pemerintah Turki, dan sekitar 1619 orang dinyatakan hilang. Pada akhirnya warga Siprus Turki di Selatan akhirnya diusir oleh warga Siprus Yunani untuk bergabung dengan saudaranya di Utara.⁷⁴

Sehubungan dengan invasi Turki dan konflik komunal di Siprus tersebut, pada 1 November 1974 Majelis umum PBB akhirnya mengeluarkan resolusi agar pihak yang terlibat pertikaian menghormati wilayah kedaulatan Siprus. PBB juga mendesak agar semua kekuatan asing di Siprus agar segera menarik diri. Sampai sekarang konflik Siprus belum terselesaikan, hal ini semakin diperburuk karena pada 1983 ketika warga Siprus Turki mendirikan negara sendiri yang disebut *Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)* dibawah Presiden Rouf Denktash

3.1.2 Politik

3.1.2.1 Politik Dalam Negeri

Undang-undang Dasar Negara Siprus 16 Agustus 1960 mengakui dua prinsip utama. Yakni pertama, mengenai *eksistensi* komunal di pulau tersebut, terdiri dari etnis Siprus Yunani dan etnis Siprus Turki. Prinsip kedua, masing-masing etnis memiliki hak dan perlakuan yang sama, baik dalam kehidupan politik maupun kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Prinsip kedua ini dimaksudkan guna menghindari dominasi etnis terbesar (Yunani) terhadap etnis minoritas (Turki).

Pasal 1 Konstitusi 1960 menegaskan bahwa Presiden Republik merdeka dan berdaulat Siprus dipilih dari warga Siprus Yunani, sedangkan Wakil Presiden berasal dari Siprus Turki. Dalam pasal 2 dipertegas siapa yang tergolong Siprus Yunani dan Siprus Turki, yaitu mereka yang berasal dari keturunan, bahasa dan kebudayaan Yunani dan Turki. Termasuk golongan pertama adalah Kristen Ortodoks, sedangkan golongan kedua adalah Islam.

⁷⁴ Ibid

Kedua etnis mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dengan bahasa pengantar sesuai dengan asal keturunannya. Kedua etnis juga diperkenankan melestarikan segala sesuatu yang berhubungan dengan negara asal keturunannya, seperti mengibarkan bendera Yunani dan Turki, memelihara kebudayaan dan mengajarkan pendidikan, olahraga, menentukan hari-hari libur masing-masing dan lain-lain.

Lembaga Eksekutif Pemerintahan

Seperti disebutkan di dalam pasal 1 Konstitusi 1960, Presiden Siprus dipilih dari etnis Siprus Yunani, dan Wakil Presiden dipilih dari etnis Siprus Turki. Jika seorang presiden berhalangan sementara atau berhalangan tetap untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai presiden, maka kedudukan presiden digantikan oleh Ketua Parlemen yang juga seorang Siprus Yunani.

Demikian pula halnya Wakil Presiden akan digantikan oleh Wakil Ketua Parlemen yang juga seorang Siprus Turki. Seorang presiden berhak menunjuk 7 (tujuh) orang menteri di dalam kabinetnya yang berasal dari etnis Siprus Yunani, sedangkan wakil presiden dapat menunjuk 3 (tiga) orang etnis Siprus Turki untuk menjadi anggota kabinet tersebut.

Presiden Siprus sekaligus bertindak sebagai Kepala Negara, memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, menerima credentials Duta Besar asing yang diakreditasikan untuk Siprus, mengangkat seorang Duta Besar/Konsul, memberikan tanda-tanda kehormatan, serta mewakili negara dan pemerintah dalam setiap kegiatan yang bersifat kenegaraan.

Sedangkan Wakil Presiden sekaligus bertindak sebagai Wakil Kepala Negara, hadir pada setiap kegiatan kenegaraan. Presiden dan Wakil Presiden mengundang (mengumumkan berlakunya) suatu undang-undang yang telah diputuskan oleh parlemen melalui Lembaran Negara dalam waktu 15 hari setelah diterima dari parlemen. Dikecualikan jika Presiden dan Wakil Presiden bermaksud hendak menjatuhkan veto terhadap suatu undang-undang, atau hendak mengembalikan kepada parlemen untuk direvisi, maupun hendak menyerahkan undang-undang tersebut kepada Mahkamah Agung untuk diuji.

Presiden dan Wakil Presiden Siprus juga mempunyai hak memberi pengampunan, hak mengurangi hukuman, atau hak menunda hukuman, serta hak merehabilitasi nama baik seseorang yang telah dijatuhkan hukuman, baik terhadap pelaku kejahatan politik/kriminal yang berasal dari etnis sendiri maupun etnis lainnya. Dalam pemilihan terakhir 16 Februari 2003, terpilih Tassos Papadopoulos sebagai Presiden Siprus untuk masa jabatan 5 tahun.

Tassos yang berasal dari partai Democratic (aliran tengah-kanan) itu mendapat dukungan dari sayap kiri partai AKEL, Democrat Sosial (KISOS) dan Ecologists- Environmentalists Movement. Tassos memenangkan 51,51% suara, sementara saingan terdekatnya mantan Presiden Glafcos Clerides hanya mendapatkan 38,80%.⁷⁵

Lembaga Legislatif (Parlemen)

Berdasarkan Konstitusi Siprus 1960, jumlah anggota parlemen adalah sebanyak 50 orang. Tujuh puluh persen (70%) diantaranya, atau 35 orang wakil dipilih dari etnis Siprus Yunani, sedangkan 30% lainnya atau 15 orang wakil dipilih dari etnis Siprus Turki, masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Berdasarkan amandemen tanggal 5 Juli 1985, keanggotaan parlemen berjumlah 80 orang, dengan pembagian 56 wakil Siprus Yunani dan 24 wakil Siprus Turki. Sejak pecahnya pertikaian antara kedua etnis dalam tahun 1964, yang mengakibatkan seluruh etnis Siprus Turki mengundurkan diri dari jajaran pemerintahan dan parlemen, maka kursi-kursi jabatan bagi Siprus Turki untuk sementara dikosongkan.

Ketua Parlemen dipilih dari etnis Siprus Yunani sedangkan Wakil Ketua dipilih dari Siprus Turki oleh rakyatnya masing-masing. Jika keduanya berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka kedudukan mereka digantikan oleh anggota tertua dari masing-masing etnis pada jabatan yang sama dengan yang digantikan, atau jika ditentukan lain dengan kesepakatan. Keanggotaan parlemen dipilih berdasarkan sistem distrik untuk masa bakti 5

⁷⁵ Ibid

(lima) tahun. Seorang anggota parlemen terpilih tidak dapat diganti selama masa jabatannya bilamana ternyata dalam masa jabatannya tersebut ia meninggal dunia, sakit dan mengundurkan diri, diberhentikan karena cacat mental/rohani yang baru diketahui kemudian.

Di dalam parlemen Siprus terdapat 3 (tiga) orang wakil lainnya, masing-masing satu wakil dari golongan Maronites, golongan Armenian, dan golongan Minoritas Latin. Mereka dipilih mewakili golongannya untuk mengikuti setiap persidangan tanpa memiliki hak suara dalam pemungutan.

Ketiga wakil ini hanya boleh menyampaikan pandangan berkaitan dengan kelompok yang diwakilinya. Hasil Pemilu di Siprus pada tanggal 27 Mei 2001 adalah sebagai berikut :

AKEL-Communist Party	: 17 wakil
Disy Party	: 15 wakil
EDEK-Socialist Party	: 1 wakil
Diko Party	: 7 wakil
Kisos Party	: 3 wakil
UD Party	: 1 wakil
Greens Party	: 1 wakil
New Horizons	: 1 wakil
Jumlah	: 46 wakil

(catatan: wakil Siprus Turki tetap dikosongkan).

Pada 8 Juni 2001, Parlemen telah memilih ketuanya yang baru yaitu Demetris Christofias yang merupakan ketua partai AKEL dan berasal dari sayap kiri.

Partai Politik

Partai-partai politik yang terdapat di Siprus sebagai berikut :

- Democratic Rally/Liberal Party,
Berhaluan *centre-right*, didirikan oleh Mr. Glafcos Derides (mantan Presiden Siprus) dalam tahun 1976, saat ini diketuai oleh Mr. Loannis Matsis. Partai ini

mendapat dukungan koalisi partai-partai kecil lainnya, seperti *European People's Party* (EPP), *the Union of European Christian Democrats* (UECD), *the European Democrats Union* (EDU), dan *the International Democratic Union* (IDU).

- AKEL (*the Progressive Party of the Working People*)
Adalah warisan/penjelmaan dari Partai Komunis Siprus 1926 yang dinyatakan terlarang oleh kolonial Inggris tahun 1931. Partai ini (AKEL) berhaluan Marxist-Leninist didirikan tahun 1941, pernah dinyatakan illegal dari tahun 1955-1959. Sekjen partai saat ini adalah Demetris Christoflas.
- DIKO (*Democratic Party*)
Didirikan pada 12 Mei 1976 oleh Mr. Spyros Kyprianou. Partai ini berhaluan tengah dengan prinsip penegakan ajaran demokrasi dan keadilan berdasarkan hukum.
- EDEK (*Eniea Demokratiki Enosis Kyprou*) atau pernah dikenal dengan nama Democratic Union of Siprus, kini lebih populer dengan "*the EDEK Socialist Party*". Partai ini diketuai oleh Dr. Vassos Lyssarides, mantan Ketua Parlemen tahun 1985-1991.
- KED (*The Free Democrats Movement*) berhaluan tengah, didirikan pada April 1993. Saat ini diketuai oleh Dr. George Vassiliou (mantan Presiden Siprus tahun 1988-1993). Tujuan pokok partai ini adalah penegakan azas-azas demokrasi, keadilan sosial, dan ekonomi bebas bagi seluruh rakyat. Pada Desember 1996 KED melakukan merger dengan ADISOK membentuk partai baru yang bernama *Enomeni Dinokrates* (EDE).
- EDE (*Enomeni Dinokrates*). Partai ini didirikan pada tahun 1996 yang merupakan hasil merger antara KED dengan ADISOK.

Lembaga Yudikatif

Susunan kekuasaan Judikatif berdasarkan UUD 1960 adalah sebagai berikut :

- The Supreme Court of the Republic
- The Assize Court (Permanent Assize Court for all Districts).
- District Courts
- Military Court

- Industrial Disputes Court
- Rent Control Courts
- Family Courts

Mahkamah Agung memiliki 13 orang Hakim Agung, salah seorang diantaranya bertindak sebagai Ketua. Ketua Supreme Court saat ini adalah Georgios Pikis (58 tahun).

Badan-badan Independen

Berdasarkan UUD 1960 terdapat badan-badan lain yang bersifat independent, yakni Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Komite Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Perencanaan, Bank Sentral, Komite Pendidikan dan Pengacara.

Pembagian Wilayah

Wilayah Administrasi Siprus terbagi atas 6 (enam) distrik, yakni masing-masing :

- Distrik Nicosia
- Distrik Limassol
- Distrik Famagusta
- Distrik Larnaca
- Distrik Paphos
- Distrik Kyrenia.

Setiap distrik dipimpin oleh seorang Kepala Distrik. Meskipun pada dasarnya seorang Kepala Distrik mewakili kepentingan wilayahnya, namun ia juga memegang kepentingan atau perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam pelaksanaan tugas berbagai kementerian di wilayah distrik.

Di bawah tingkat distrik terdapat apa yang disebut "*Local Authorities*". *Local Authorities* ini terdiri dari 3 (tiga) sistem, yakni *Municipal Councils* (paling

atas), *Improvement Boards* (menengah), dan *Village Commissions* (paling rendah). Uniknya adalah masing-masing bersifat independen dan tidak mengenal hirarki satu dengan yang lainnya.

Suatu *Village Commissions* dapat ditingkatkan peranannya ke tingkat *Improvement Boards* dengan maksud guna memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Perubahan ini dapat terjadi disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan suatu desa.

3.2 Politik Luar Negeri

Siprus resmi menjadi anggota PBB pada tanggal 20 September 1960. Kemudian disusul keanggotaannya pada Negara-negara Persemakmuran Inggris (*Commonwealth*) pada tahun 1961, Gerakan Non Blok, Dewan Eropa (*Council of Europe*) pada Mei 1961, dan Organisasi Kerjasama Keamanan Eropa (*the Organization on Security and Cooperation in Europe*) pada tahun 1975. Pada tahun 1990, Siprus mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Uni Eropa, dan saat ini Siprus sedang mempersiapkan untuk menjadi anggota penuh.

Siprus yang memegang teguh prinsip-prinsip PBB menjalin hubungan persahabatan dengan sejumlah negara berdasarkan prinsip saling menghormati dan atas dasar saling menguntungkan rakyat masing-masing negara. Hubungan khusus yang berlangsung dengan Yunani, hanya didasarkan pada suatu kenyataan bahwa penduduk Siprus sebagian besar adalah keturunan Yunani.

3.2.2 Ekonomi

Sistem ekonomi Siprus adalah liberal, dimana pemerintah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada swasta untuk berperan dalam perekonomian nasional. Sedangkan pemerintah berperan sebagai pelengkap dan pendorong melalui pemeliharaan makro ekonomi yang stabil, yaitu dalam bidang utamanya antara lain industri, jasa telekomunikasi, maritim dan pariwisata. Salah satu faktor

utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sektor jasa bersama dengan sektor pariwisata.⁷⁶

Pendapatan dari sektor tersebut mengalami penurunan secara dratis setelah serangan teroris September 2001 dan pada saat ini sektor tersebut mulai pulih kembali. Salah satu faktor lainnya adalah produksi pertanian, keuangan dan perbankan, transportasi dan komunikasi. Selain dari bidang pelayaran merupakan salah satu sektor penting untuk bagi pertumbuhan ekonomi nasional karena sektor tersebut telah menyumbangkan sekitar 9.3 %.

Dalam bidang perdagangan luar negeri, Pemerintah Siprus tetap mengalami defisit sekitar US\$ 2,5 milyar rata-rata pertahunnya mengingat bahwa sampai saat ini hasil produksi dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga masyarakat lebih berminat untuk mengkonsumsi produk luar negeri. Beberapa indikator ekonomi Siprus dalam tahun 2002, antara lain : Pertumbuhan ekonomi tahun 2002 mencapai 2,2 %, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,8%.

Tingkat inflasi tahun 2002 sebesar 2,8%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2%. Tingkat pengangguran tahun 2002 sekitar 3,4%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai hanya 3%. Pendapatan perkapita tahun 2002 diperkirakan sekitar US\$ 14.000, sama dengan tahun sebelumnya.⁷⁷

Pemerintah Siprus juga berusaha untuk menyesuaikan kebijaksanaan ekonomi makro dengan kebijakan ekonomi Uni Eropa karena Siprus akan menjadi anggota penuh Uni Eropa tanggal 1 Mei tahun 2004.

Penyesuaian Kebijakan ekonomi nasional terhadap Uni Eropa adalah merupakan salah satu persiapan Pemerintah Siprus untuk menjadi anggota penuh anggota Uni Eropa. Reformasi pada struktur perekonomian nasional telah diberlakukan antara lain liberalisasi perdagangan, bunga bank, menghapuskan pembatasan investasi lokal, menghapuskan pengendalian harga barang-barang dan meningkatkan peran swasta pada bidang konstruksi serta proyek infrastuktur

⁷⁶ Berita Faksimil Pusat Kajian DEPLU. *Laporan Tahunan Dari Keduataan Republik Indonesia di Qatar* Tahun 2004. Hlm 18

⁷⁷ Ibid

Perdagangan

Volume perdagangan luar negeri Siprus mengalami defisit setiap tahunnya rata-rata sekitar US\$ 3 milyar. Dalam tahun 2002 mengalami defisit karena jumlah impor jauh lebih tinggi dari jumlah ekspor. Jumlah impor Siprus 2002 mencapai CPY 2,5 milyar (sekitar US\$ 4,2 milyar) sedangkan jumlah ekspornya mencapai CPY 628 juta (sekitar US\$ 1,06 milyar sehingga defisit neraca perdagangan tahun 2002 mencapai 3,14 milyar. Komoditi ekspor terbesar adalah dari produk pertanian dan produk-produk industri ringan, yaitu sekitar 75%.⁷⁸

Komoditi Impor

Komoditi impor Siprus terdiri dari bahan baku 29,2%, kebutuhan konsumen 28,7, alat-alat transportasi 16%, bensin dan pelumas 10,8% dan produk-produk lainnya sebesar 9,9%. Pada tahun 2002, jumlah impor bahan baku US\$ 1,23 milyar, kebutuhan konsumen mencapai US\$ 1,2 milyar dan produk lainnya mencapai US\$ 418 juta, alat-alat transportasi mencapai US\$ 674 juta, bensin dan pelumas mencapai US\$ 457 juta.⁷⁹

Mitra dagang utama Siprus adalah negara-negara Uni Eropa yang telah mengekspor produk-produk tersebut diatas sebesar 53% dengan nilai sebesar US\$ 2,184 milyar. Negara-negara anggota Uni Eropa adalah Yunani, Italia, Jerman dan Inggris. Negara-negara di kawasan Asia merupakan kelompok negara terpenting kedua karena telah mengekspor sekitar 20,4% dari total impor Siprus dengan nilai sekitar US\$ 863 juta yaitu Jepang, China, Israel, Thailand, Taiwan dan Hongkong. Jepang adalah pengekspor terbesar di kawasan Asia dengan jumlah ekspor sebesar 285 juta.⁸⁰

Siprus juga mengimpor dari negara-negara di kawasan Eropa lainnya yaitu negara-negara Eropa Timur sekitar 8,6% dengan nilai sekitar US\$ 362 juta yaitu

⁷⁸ Ibid Hlm 19

⁷⁹ Ibid Hlm 20

⁸⁰ Ibid Hlm 20

Rusia, Ukraina dan Swizerland. Negara-negara di kawasan Amerika mengekspor sekitar 5,3% dari total impor Siprus dan Amerika Serikat merupakan negara terbesar dari kawasan dimaksud dengan nilai US\$ 210 juta.

Jumlah impor Siprus dari negara-negara Arab sebesar 5,3% yaitu Suriah, Mesir dan Saudi Arabia. Siprus mengimpor dari negara-negara di kawasan lainnya yaitu Argentina, Brazil, Canada, Afrika Utara, Australia dan Selandia Baru sebesar 7,4%. Sedangkan komoditi ekspor Siprus terdiri dari produk-produk industri dalam negeri sebesar 77,7%, bahan baku produk pertanian 21,3 %. Mitra dagang terbesar adalah negara-negara Uni Eropa, dimana Pemerintah Siprus mengimpor sekitar 53,4% dan ekspornya mencapai 56,7%. Mitra dagang terbesar lainnya adalah negara-negara di Timur Tengah, Eropa Timur dan Amerika Serikat.⁸¹

Komoditi Ekspor

Jumlah ekspor Siprus sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah impor, sehingga mengakibatkan minus perdagangan luar negeri hampir setiap tahunnya. Komoditi ekspor Siprus adalah produk-produk industri 63,8%, bahan baku pertanian sekitar 16,6 % dan hasil industri pertanian sebesar 14,8%. Produk-produk industri yang terbesar antara lain adalah produk farmasi, pakaian jadi, produk-produk plastik, furniture, produk-produk kertas dan rokok. Sedangkan bahan baku pertanian sebesar 16,6% dan produk-produk industri pertanian sebesar 14,8%.⁸²

Bahan baku pertanian antara lain buah Citrus dan kentang. Sedangkan hasil industri pertanian terbesar adalah keju, minuman anggur dan jus dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Negara-negara anggota Uni Eropa antara lain adalah Inggris, Yunani, Jerman dan Belanda merupakan negara pengimpor produk-produk Siprus terbesar yaitu sekitar 50,8%.

⁸¹ Ibid Hlm 21

⁸² Ibid Hlm 22

Exports: \$1.495 billion f.o.b. (2007 est.)⁸³

	Exports	Rank	Percent Change	Date of Information
2003	\$1,030,000,000	124		2001 est.
2004	\$1,054,000,000	125	2.33 %	2003 est.
2005	\$1,094,000,000	128	3.80 %	2004 est.
2006	\$1,237,000,000	133	13.07 %	2005 est.
2007	\$1,340,000,000	132	8.33 %	2006 est.
2008	\$1,495,000,000	135	11.57 %	2007 est

Negara-negara Arab yaitu Libanon, Jordan, Uni Emirat Arab, Irak, Saudi Arabia, Kuwait dan Mesir merupakan pengeksport komoditi Sirpus kedua setelah Uni Eropa yaitu sekitar 20,3 %. Negara-negara Eropa Timur yaitu Rusia, Republik Chech, Romania, Albania dan Norway mengimpor produk Siprus sebesar 11,3 %, negara-negara di Asia yaitu Israel, Hongkong dan Malaysia mengimpor sekitar 6,8%, sedangkan negara-negara dikawasan lainnya mengimpor produk-produk Siprus sekitar 6,6% dari total ekspor Siprus.⁸⁴

Untuk meningkatkan volume ekspor, Kementrian Perdagangan Siprus telah mendirikan pusat-pusat perdagangan di beberapa negara. Terdapat 12 pusat perdagangan Siprus di beberapa negara yaitu Austria, Republik Czeck, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani, Israel, Rusia, Swedia, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika.

Investasi

Dibidang investasi, Pemerintah Siprus telah berusaha untuk mendorong investor asing khususnya investor Uni Eropa dan lokal agar menanamkan modalnya di Siprus. Salah satu kebijakan adalah memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor, yaitu dengan menghapuskan batas maksimal modal dan jumlah pekerja bagi investor Uni Eropa dan investor lokal sejak awal tahun 2000.

Namun prosedur yang sama diberlakukan terhadap investor negara-negara Uni Eropa dan non-Uni Eropa serta lokal sama untuk menanamkan modalnya di

⁸³ Diakses melalui [www. Indexmundi.com/http. Eksport Cyprus. Html](http://www.indexmundi.com/http.Eksport%20Cyprus.html) tanggal 1-7-09 Pukul 01.00 Wib

⁸⁴ Ibid Hlm 25

Siprus. Selain itu, Pemerintah Siprus telah memberikan kebebasan bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk mata uang asing.

Kebijakan tersebut telah meningkatkan jumlah investasi di Siprus. Jumlah investasi asing tahun 2002 sebesar US\$ 164 juta, tahun 2001 mencapai US\$ 163 juta dan tahun 2000 yang mencapai US\$ 162,6 juta. Investasi asing di Siprus meliputi berbagai bidang antara lain pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dan perbankan. Sekitar 54.000 perusahaan asing dan 14.000 Pusat Bisnis Internasional dengan 1.200 kantor asing beroperasi di Siprus.⁸⁵

Pariwisata

Bidang Pariwisata dan jasa merupakan salah satu bidang yang diandalkan Pemerintah Siprus untuk meningkatkan pendapatan negara. Jumlah pendapatan bidang pariwisata rata-rata dalam satu tahun sekitar US\$ 2 milyar dengan jumlah pengunjung sekitar 2,5 juta turis dari manca negara. Jumlah wisatawan terbesar berasal dari Inggris, Jerman, Yunani dan Italia. Jumlah wisatawan menurun secara drastis setelah serangan teroris 11 September 2001, namun pada saat ini telah mulai normal kembali.

Pemerintah Siprus menyadari bahwa bidang pariwisata sangat tergantung dari kondisi dalam negeri serta gejolak politik luar negeri, sehingga pemerintah berusaha menggalakkan dan meningkatkan sektor tersebut dengan meningkatkan sektor jasa serta senantiasa memelihara dan membangun fasilitas pariwisata. Sektor pariwisata sangat penting bagi perekonomian nasional karena dapat menyerap tenaga kerja sekitar 40.000. Tenaga kerja bidang pariwisata ditempatkan diberbagai sektor jasa antara lain perhotelan, restoran, dan pemandu pariwisata.⁸⁶

Pelayaran

Pemerintah Siprus telah mengolah sektor pelayaran untuk dapat menunjang pendapatan devisa asing sejak tahun 1963 dengan memperkenalkan

⁸⁵ Ibid Hlm 30

⁸⁶ Ibid Hlm 31

peraturan yang mengatur kapal-kapal yang singgah di perairan Siprus. Letak geografis Siprus strategis yang menjembatani antara kawasan Eropa dan kawasan Timur Tengah telah mendorong pemerintah setempat untuk membangun pelabuhan Larnaka sebagai salah satu tempat untuk persinggahan kapal-kapal asing untuk kebutuhan dagang.

Sampai saat ini terdapat lebih dari 100 perusahaan pelayaran yang beroperasi dipelabuhan di Siprus. Pelabuhan di Siprus menduduki urutan ke 6 terbesar didunia yang disinggahi kapal-kapal asing dengahn sekitar 2.700 kapal dengan muatan 26 juta gros ton.⁸⁷

Sebanyak 25% dari Perusahaan Pelayaran Siprus di Siprus merupakan perusahaan Uni Eropa. Perusahaan pelayaran telah memberikan kontribusi 2% dari pendapatan negara. Sampai tahun 2002 tercatat sekitar 140 perusahaan yang beroperasi dalam industri pelayaran dengan menyerap sekitar 5000 tenaga kerja.

Industri

Sebagian besar hasil industri Siprus adalah industri ringan tanpa menggunakan teknologi canggih yaitu antara lain makanan, tekstil, kulit, furniture, kayu, kertas, plastik. Untuk meningkatkan persaingan di pasar internasional, Pemerintah Siprus berusaha untuk menggunakan teknologi tinggi untuk meningkatkan kualitas produkproduk industrinya, karena kontribusi dari produk-produk industri tersebut merosot dalam 15 tahun terakhir ini.

Selain dari itu, kebijakan pemerintah untuk menggunakan teknologi tinggi juga untuk mengadopsi ketentuan dari Uni Eropa. Kebijakan Pemerintah Siprus untuk menggunakan teknologi tinggi adalah selain untuk bersaing di pasar internasional juga untuk dapat bersaing di pasar lokal, karena tidak adanya hambatan tarif maupun non tarif bagi produk-produk asing untuk bersaing di pasar Siprus.⁸⁸ Sehingga masyarakat Siprus lebih tertarik untuk mengkonsumsi produk-produk impor, mengingat kualitas lebih baik dari produk lokal dan harganya dapat dijangkau oleh masyarakat setempat.

⁸⁷ Ibid Hlm 34

⁸⁸ Ibid Hlm 37

Sektor industri telah menyumbangkan sekitar 10% pada GDP, selain dari itu sektor industri juga merupakan sektor penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya untuk mengurangi pengangguran karena tenaga kerja yang diserap sektor industri sekitar 37.400 orang.

Pemerintah Siprus telah bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan terhadap para pekerja di Siprus.

Perusahaan-perusahaan yang ingin memperoleh bantuan dari bank akan terdorong untuk melakukan aktivitas-aktivitas khusus demi pemulihan ekonomi. Pembaruan ini terdiri dari proses desentralisasi manajemen terhadap produksi dan jasa, memperkuat otonomi daerah, perlindungan hak milik umum, penataan kembali administrasi pusat dengan mengurangi jumlah kementerian dan perkantoran.

Kamar Dagang Siprus adalah organisasi dagang terbesar di Siprus yang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Siprus. Kamar Dagang ini mewakili lebih dari 30% total keseluruhan aktivitas bisnis di Siprus serta turut mendorong aktivitas perdagangan luar negeri Siprus melalui berbagai upaya promosi maupun pameran perdagangan.

Kamar Dagang ini terbagi dua cabang : industri dan perdagangan. Selain itu, Siprus juga memiliki Klub Pusat Bisnis (*The Business Center Club*) yang didirikan pada tahun 1991, sebagai organisasi dagang terbesar kedua yang didirikan oleh pihak swasta tanpa keterlibatan pemerintah. Klub ini mewakili lebih dari 1.800 perusahaan swasta dan perusahaan asing Siprus.

Organisasi bisnis dan dagang di Siprus lainnya antara lain: Dewan Bisnis Siprus (*The Polish Business Council*), Asosiasi Manajer di Siprus (*The Association of Managers in Siprus*), dan Konferensi Pengusaha-Pengusaha Swasta Siprus (*The Polish Conference of Privte Employers*)

3.2 Hubungan Kerjasama Siprus dan Uni Eropa

Hubungan antara Uni Eropa dengan Siprus pasca perang dingin berlangsung lebih baik karena adanya keterdekatan geografis serta itikad baik dari Siprus untuk bergabung dengan dunia barat. Uni Eropa bertekad untuk senantiasa meningkatkan kerjasamanya dengan Siprus secara intensif yang dibuktikan dengan pemberian sejumlah program bantuan.

Pada pertemuan puncak negara-negara industri Barat di Paris bulan Juli 1990, Komisi Masyarakat Eropa mendapat mandat untuk mengkoordinir program bantuan bersama bagi Siprus dan Hongaria dari negara-negara industri dalam kelompok 24 (*the Group of 24*). Kelompok 24 terdiri dari 12 negara anggota Masyarakat Eropa, 6 negara anggota EFTA ditambah Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Turki.⁸⁹

Kelompok 24 tersebut sepakat untuk melaksanakan lima bidang pembaharuan di kedua negara yang meliputi : restrukturisasi sektor pertanian Siprus; perbaikan akses ke pasaran negara-negara Barat bagi barang-barang dari Siprus dan Hongaria; promosi bidang investasi di Siprus dan Hongaria: melakukan latihan-latihan kejuruan pada berbagai tingkat khususnya dibidang keuangan dan perbankan serta perbaikan di bidang lingkungan, khususnya di daerah industri termasuk tempat-tempat bersejarah dan bernilai seni.

Untuk memperoleh bantuan ekonomi ini, Siprus harus membangun suatu ekonomi pasar, pemerintah yang demokratis serta menghargai hak-hak azasi manusia.

Bantuan Masyarakat Eropa ke Siprus dalam bentuk bantuan darurat ini telah dikirimkan sejak bulan Agustus 1991. Masyarakat Eropa tidak hanya mengirimkan bantuan ke Siprus berupa gandum, daging, minyak oli dan buah jeruk, akan tetapi juga mengalokasikan dana sekitar 200 juta ECUs dalam bentuk hibah bagi proyek-proyek penting. Masyarakat Eropa juga menyediakan dana 1.000 juta ECUs melalui Bank Investasi Eropa.

⁸⁹ Agus R, Rahman. *Penelitian Perubahan Konfigurasi Ekonomi-Politik Eropa: Pendalaman dan Perluasan Masyarakat Eropa*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pembangunan Politik dan Kewilayahan LIPI. 1993.Hlm 66

Tabel 3.3 Bantuan Uni Eropa Terhadap Siprus

Tahap	Periode	Tujuan
I	1989-1991	Bantuan kemanusiaan bagi Siprus pasca perang dingin
II	1991-1993	Bantuan dana structural dan pelatihan
III	1993-1997	Dukungan bagi investasi di Siprus
IV	1997-1999	Bantuan guna mendukung kebutuhan pre-accesion Siprus
V	1997-2006	Bantuan struktural Uni Eropa di Siprus
VI	2000-2008	Program bantuan bagi integrasi Siprus ke Uni Eropa (PHARE II, ISPA, SAPARD)

Sumber : <http://www.pwcglobal.com/sy/eng/about/fund.html>.

Pada dasarnya program bantuan Uni Eropa bagi Siprus terbagi menjadi dua macam. Pertama program bantuan dana struktural bagi pembangunan kembali Siprus pasca perang dingin, seperti terlihat pada tabel diatas. Program bantuan dana struktural Uni Eropa ke Siprus ini dimaksudkan untuk mendukung penyelesaian permasalahan ekonomi maupun sosial yang sedang dihadapi oleh Siprus pasca perang dingin serta meningkatkan sumber daya manusia Siprus.⁹⁰

Kedua adalah program serta bantuan guna mendukung *pre-accession* Siprus ke Uni Eropa yakni program PHARE, ISPA dan SAPARD.

Pada tahun 1991, Masyarakat Eropa (Uni Eropa) memberikan dana bantuan melalui program PHARE I sebesar kurang lebih 200 juta Euro. Pada periode 2000-2006, Uni Eropa manganggarkan total dana PHARE II sejumlah 1.560 juta Euro untuk investasi serta pembangunan kelembangaan di Siprus dan Hongaria. Dalam PHARE II tersebut, Siprus mendapatkan dana bantuan sebesar 340-400 juta Euro.⁹¹

Program ISPA (*Instrument for Structural Policies for Pre-Accession Program*) merupakan dana bantuan untuk membantu para negara kandidat memenuhi syarat-syarat (*acquis*) Uni Eropa terutama di bidang transportasi dan

⁹⁰ (<http://www.pwcglobal.com/sy/eng/about/fund.htm>).

⁹¹ (<http://www.pwcglobal.com/sy/eng/about/fund.html>).

konservasi lingkungan hidup. Total dana ISPA periode 2000-2006 adalah 1.040 juta Euro, Siprus mendapatkan dana 330-370 juta Euro

Program SAPARD (*Special Accession Program for Agricultural and Rural Development*) merupakan dana bantuan Uni Eropa bagi pembangunan infrastruktur pedesaan dan pertanian para negara kandidat demi memenuhi syarat *acquis*. Total dana SAPARD periode 2000-2006 adalah 520 juta Euro, 170 juta Euro dialokasikan Siprus.⁹²

Tabel 3.4 Bantuan Uni Eropa Terhadap Siprus Untuk Memenuhi Acquis

Instrumen Keuangan	Tujuan	Jumlah Anggaran	
		Total	Dana bagi Siprus
		Juta Euro	
PHARE	Dukungan investasi serta pembangunan kelembagaan	1.560	350 - 400
ISPA	Adaptasi <i>acquis</i> di bidang transportasi dan lingkungan	1.040	330 - 370
SAPARD	Pembangunan infrastruktur pedesaan serta pertanian	520	170

Sumber : <http://www.pwcglobal.com/sy/eng/about/fund.html>

Selain program-program bantuan diatas, Uni Eropa juga mengadakan proyek *twinning* untuk empat sektor kebijakan publik: pertanian, lingkungan hidup, keuangan, masalah-masalah keadilan serta domestik. Proyek *twinning* merupakan suatu bantuan teknis yang langsung ditujukan pada suatu proyek tertentu di Siprus. Namun para pelaku proyek *twinning* tersebut harus melakukan hubungan kerja dengan mitra (yang telah ditunjuk) dari Uni Eropa secara terus menerus. Pada tahun 1998, Kementerian Pertanian Siprus mengadakan proyek *twinning* dengan para mitranya di Denmark, Jerman, Irlandia, Perancis dan Belanda.

⁹² (<http://www.pwcglobal.com/sy/eng/about/fund.html>).

Selain bantuan teknis, Uni Eropa juga melakukan investasi di Siprus yang meliputi investasi di bidang struktur dan pembangunan; mesin, peralatan dan instalasi serta transportasi. Investasi langsung ekonomi swasta Uni Eropa di Siprus meliputi sekitar lebih dari 300 juta euro. Investasi-investasi Uni Eropa dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5 Investasi Uni Eropa di Siprus

Investasi		1998	1999	2000	2001	2002
Total Investasi	Juta Euro	369,7	366,1	368,6	344,6	324,9
Struktur dan pembangunan	Juta Euro	107,1	112,8	122,1	112,7	106,1
Mesin, peralatan dan instalasi	Juta Euro	129,4	124,8	123,2	121,5	103,3
Transportasi	Juta Euro	133,2	128,5	123,3	110,4	115,5

Sumber: http://europa.eu.int/sy/financ/index_en.htm

3.3 Faktor-Faktor Pendorong Percepatan Siprus Masuk dalam Keanggotaan Uni Eropa

Kriteria Politik

Referendum inisiatif sekjen PBB yang diselenggarakan pada bulan April 2004 pada intinya antara lain pengembalian Siprus Yunani yang dulu diduduki Turki pasca perpecahan 1974 dan pengaturan sistem keamanan terkait dengan keberadaan Turki di Siprus Utara, etnis Siprus menolak inisiatif Sekjen PBB dengan alasan utama bahawa tidak ada jaminan keamanan di masa yang akan datang mengingat masih adanya pasukan Turki di wilayah Utara.

Siprus Turki mengharapakan dunia Internasional melakukan langkah-langkah diakhirinya blokade yang diterapkan Siprus Turki sejak terjadinya perpecahan.

Siprus Yunani melalui perjuangan yang gigih mendapatkan dukungan dari pemerintah Yunani untuk menjadi anggota Uni Eropa (Mei 2004) dengan

demikian Siprus telah memiliki wewenang dan kewajiban sebagai anggota UE, sementara dipihak lain Siprus Turki dan Turki tidak mengalami perubahan.

Turki telah banyak mengalami perubahan. Turki mulai banyak pertimbangan karena Turki mau masuk menjadi anggota Uni Eropa. Pemerintahan Siprus Yunani menjadi bagian dari Uni Eropa meninggalkan Siprus Turki. Presiden Tassos Papadpoulos mengharapkan agar Siprus Turki mendapat manfaat dari bergabungnya Siprus Yunani dalam keanggotaan Uni Eropa. Meskipun tidak mengakui eksistensi dari Siprus Utara, Uni Eropa dan Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang lunak kepada mereka.

Kriteria Ekonomi

Di bidang ekonomi, Siprus telah memiliki hampir semua sifat-sifat ekonomi pasar, memiliki krangka kerja institusional yang baik, sektor swasta yang dinamis, dan peraturan perdagangan bebas. Ekonomi Siprus memiliki potensi untuk tumbuh dan menunjukkan kemampuan beradaptasi yang tinggi, khususnya dalam konteks persatuan perdagangan, yang telah mendorong modernisasi. Faktor-faktor ini memungkinkan Siprus untuk menyediakan pasar yang kuat dalam persaingan.

Siprus telah membuat kemajuan dalam stabilisasi ekonomi makro, privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah berjalan dengan baik, dan langkah penting untuk mereformasi sistem pertanian, sistem keamanan sosial, dan sektor finansial telah diambil. Siprus yang sedang dalam masa transisi ekonomi pasar, masih memerlukan peningkatan refotmasi struktural, terutama sistem perbaikan dan keamanan sosial.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Siprus adalah tingkat pengangguran yang telah meningkat sejak tahun 1994 (14,45%). Bahkan pada tahun 2002, tingkat pengangguran Siprus mencapai 19,9%. Tingginya tingkat pengangguran ini disebabkan oleh adanya restrukturisasi ekonomi yang berkelanjutan, ketatnya peraturan pasar pekerja, biaya pekerja yang relatif tinggi dan perkembangan demografi (terjadinya *baby boomers*).

Walaupun demikian, jika Siprus ingin menjalankan perekonomiannya secara efisien dan mendapatkan keuntungan dengan sebesar-besarnya, maka Siprus harus membangun stabilitas ekonomi makro yang dapat diandalkan serta suatu iklim yang memungkinkan sektor finansial berperan sebagai perantara. Pemerintah Siprus juga harus terus memusatkan perhatian untuk menurunkan tekanan inflasi dan defisit publik, serta mempertahankan komitmen mereka bagi reformasi struktural dan liberalisasi pasar.

Siprus telah melaksanakan *Custom Union* sejak tahun 2002 dan telah memperlihatkan kemampuannya untuk menerapkan syarat-syarat yang diajukan dalam keputusan Custom Union. Siprus juga telah berhasil memenuhi batas waktu yang diberikan. Siprus telah memulai proses penyatuan dengan hukum-hukum Uni Eropa pada hampir setiap bidang yang ditunjuk dalam *European Strategy*, meskipun masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan, terutama dalam hal pasar internal, pertanian, perhubungan, dan lingkungan.

Harmonisasi di sektor finansial juga telah mengalami peningkatan. Secara umum situasi yang berkaitan dengan kebebasan pergerakan barang cukup memuaskan dan Siprus telah mencapai tingkat yang tinggi dalam pengadaptasian standar Eropa walau belum sepenuhnya mengadaptasi kerangka hukum.

Sistem perekonomian Siprus adalah liberal dimana pemerintahan mereka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk mengelola perekonomian mereka. Sedangkan pemerintahan Siprus berperan sebagai pelengkap dan pendorong bagi pengembangan dan pemeliharaan makro ekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di Siprus tahun 2004 dan naik 3,5% dari tahun 2003 yang mencapai 2% tingkat inflasi turun 2,5% dari 4,1% pada tahun 2003 defisit fiskal turun 4,4% terhadap GDP dibandingkan tahun 2003 yang mencapai 5,4% dalam kurun waktu 2004 Siprus masih mengandalkan sektor-sektor pariwisata dan maritimnya dalam rangka mengembangkan roda ekonomi.

Dalam rangka menggerakkan roda perekonomiannya jumlah pendapatan dari sektor pariwisata pada tahun 2004 mencapai Cyp 982,3 juta (sekitar 2,16 miliar US Dolar) turun 3,2% dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai

sekitar Cyp 1.015 juta (2,23 miliar US Dolar) turis asing yang berkunjung ke Siprus pada tahun 2004 mencapai 2.3 juta orang.

Tahun 2004 pemerintah Siprus tetap melanjutkan ekonomi liberal dan terus melanjutkan kebijakan tersebut guna menyesuaikan dengan keanggotaan Uni Eropa. 1 Mei 2004 Siprus masuk dalam keanggotaan Uni Eropa serta harus lebih terbuka dalam bidang ekonomi dan sebagai kebijaksanaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa, konsekuensinya 0% untuk bea tarif masuk terhadap produk-produk yang masuk dari Uni Eropa dan harus menerapkan pajak bea masuk yang setinggi-tingginya untuk negara yang bukan anggota Uni Eropa, selain itu peraturan Uni Eropa, pemerintah Siprus harus meningkatkan pajak VAT 15% untuk beberapa jenis produk sebelum masuk Uni Eropa pemerintah Siprus telah menerapkan pajak VAT 10-13% sehingga barang yang dipasarkan di Siprus menjadi lebih mahal dari sebelumnya.

Pada awal 2004 pemerintah Siprus lebih dulu telah melakukan sosialisasi untuk menerapkan standar pajak VAT yang baru dibidang pertanian, peternakan dan perdagangan pemerintah Siprus telah memberikan sanksi ekonomi terhadap beberapa perusahaan swasta yang tidak dapat memenuhi standar pajak tersebut, untuk bidang investasi mengingat kondisi politik dan sistem perekonomian Siprus yang cukup kondusif maka investor lokal dan asing sangat tertarik untuk menanamkan modal di Siprus.

Pemerintah Siprus telah menghapus kebijakan/peraturan yang menghambat arus asing yaitu para investor dan investor asing (non Uni Eropa) dimana sebelumnya mereka tidak boleh menanamkan investasi 100% di Siprus, namun sejak 1 Oktober 2004 perusahaan asing non Eropa telah diizinkan untuk menanamkan modal 100% di Siprus. Kebijakan tersebut telah meningkatkan investasi lokal dan asing beroperasi di Siprus sehingga mencapai 9.288 atau telah meningkat dibandingkan tahun 2003 yang mencapai 9.080 jumlah perusahaan lokal yang beroperasi di Siprus sampai dengan bulan September 2004 mencapai 122.260 dalam bidang moneter pemerintah Siprus telah merencanakan akan menggunakan mata uang Euro pada kuartal kedua tahun 2005 dan Siprus mengharapkan pemerintahnya telah dapat memenuhi syarat-syarat yang telah

ditetapkan oleh Uni Eropa agar sistem pemakaian mata uang Euro dapat diberlakukan sepenuhnya 2005.

Cyprus Exports by Product Section in US Dollars - Yearly⁹³

Section	2001	2002	2003	2004	2005	
0 - Food and live animals	\$107,690,000	\$114,360,000	\$142,864,000	\$194,400,000	\$190,253,000	All countries
1 - Beverages and tobacco	\$278,513,000	\$130,070,000	\$115,918,000	\$78,529,000	\$85,396,000	All countries
2 - Crude materials, inedible, except fuels	\$20,507,000	\$22,266,000	\$25,512,000	\$38,441,000	\$42,181,000	All countries
3 - Mineral fuels, lubricants and related materials	\$88,887,000	\$67,866,000	\$86,015,000	\$83,903,000	\$231,576,000	All countries
4 - Animal and vegetable oils, fats and waxes	\$3,099,000	\$5,121,000	\$5,143,000	\$4,226,000	\$3,342,000	All countries
5 - Chemicals and related products, n.e.s.	\$79,831,000	\$98,604,000	\$105,056,000	\$141,847,000	\$162,407,000	All countries
6 - Manufactured goods classified chiefly by material	\$93,527,000	\$68,947,000	\$70,184,000	\$63,157,000	\$49,798,000	All countries
7 - Machinery	\$198,884,000	\$228,544,000	\$280,027,000	\$434,449,000	\$634,585,000	All countries

⁹³ Diakses melalui [www. Indexmundi.com/http. Ekspor Cyprus. Html](http://www.Indexmundi.com/http.EksporCyprus.Html) tanggal 1-7-09 Pukul 01.00 Wib

and transport equipment						es
8 - Miscellaneous manufactured articles	\$102,756,000	\$100,582,000	\$90,981,000	\$131,793,000	\$133,047,000	All countries
9 - Commodities and transactions not classified elsewhere in the SITC	\$819,000	\$938,000	\$1,164,000	\$722,000	\$13,680,000	All countries

Dalam bidang energi pemerintah Siprus juga telah meliberalisasikan harga bahan bakar minyak. Pada bulan Mei 2005 dimana perusahaan-perusahaan minyak lokal dapat menentukan sendiri harga bahan bakar yang di jual di pasar. Selain itu pemerintah Siprus harus mengimpor produk minyak tersebut untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi dalam negerinya. Melonjaknya harga minyak di pasar mengakibatkan harga BBM yang dipasarkan di Siprus juga harus meningkat.

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Siprus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya adalah masih besarnya angka defisit neraca perdagangan luar negerinya. Jumlah defisit perdagangan luar negerinya paada Januari-November 2004 sebesar 3,9 miliar US\$.

Sedangkan untuk jumlah defisit untuk periode yang sama pada tahun 2003 mecapai 3,3 miliar US\$ makin besarnya defisit neraca perdagangan luar negeri Siprus disebabkan masih mengandalkan produk-produk impor untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan industri dalam negerinya antara lain minyak bumi sebagai bahan bakar industri misin-mesin dan alat-alat tranportasi.

Selain itu pemerintah Siprus harus meliberalisasikan ekonominya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Uni Eropa sejak tanggal 1 Mei 2004 produk yang di

ekspor oleh pemerintah Siprus antara lain: produk pertanian, alat rumah tangga, buah-buahan, mesin cetak/alat percetakan, dan peralatan kantor.

Produk-produk tersebut disaingi oleh produk-produk impor dari negara Uni Eropa dan negara non Uni Eropa namun dengan daya beli masyarakat setempat yang cukup tinggi, dengan income US\$ 18000 (2004) masyarakat setempat menggunakan produk impor tersebut walaupun harganya lebih mahal dibandingkan produk dalam negeri sendiri.

3.4 Komitmen Siprus Untuk Memenuhi Kewajiban Keanggotaan Uni Eropa

Dalam rangka mengintensifkan langkah-langkah menuju ke arah intergrasi Siprus dalam Uni Eropa, Siprus berusaha menyesuaikan kebijakan politik luar negerinya antara lain:

- Siprus berusaha menciptakan kerukunan nasional melalui dialog kelompok oposisi menuju demokratisasi dan pluralisme segala bidang kehidupan.
- Di bidang ekonomi, pemerintah berusaha untuk mempercepat proses swastanisasi dan melanjutkan kebijaksanaan ekonomi pasar serta menekan inflasi. Pemerintah juga berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan hukum ekonomi pasar.
- Meningkatkan kontak-kontak bilateral, kerjasama ekonomi maupun politik dengan negara-negara Uni Eropa.